

**ETIKA DALAM KERJASAMA SENI DI TENGAH KONFLIK GLOBAL.
KOLABORASI SENI DEWAN KESENIAN JAKARTA (DKJ) DAN UKRAINIAN
INSTITUTE (UI) TAHUN 2024**

Ivana Noor¹, Agus Satory²

¹ Magister Management, Bakrie University, Indonesia. E-mail: ivana.noor@gmail.com

² Faculty of Law, Pakuan University, Indonesia. E-mail: agussatory@unpak.ac.id

Abstract: *The dynamics of international art cooperation in the contemporary globalization era present significant ethical challenges and complexities, particularly in the context of cultural diplomacy between art institutions from developing countries and nations experiencing geopolitical conflicts, such as the relationship between Jakarta Arts Council (DKJ) and Ukrainian Institute amid prolonged war conditions. This research aims to comprehensively analyze the application of ethical principles in bilateral art cooperation during year of 2024, identify ethical factors influencing decision-making, and formulate a sustainable international art corporation ethical model. In writing the research employs a qualitative approach with library research methodology, analyzing academic literature from 2021 – 2025 through thematic analysis techniques with applied ethics theoretical framework. This research successfully identified five fundamental ethical principles: humanitarian solidarity (35%), artistic integrity (25%), political neutrality (20%), transparency (15%) and accountability (5%). The main dilemma lies in the tension between humanitarian solidarity and political neutrality, resolved through intensive dialogue, third-party mediation, and contextual adaptation. The integrated ethical model combining care ethics with local cultural contexts proves effective in managing ethical conflicts, providing practical guidelines for Indonesian arts institutions in responsible and sustainable international cooperation.*

Keywords: *Applied Ethics, Contemporary Art, Cultural Diplomacy, Humanitarian Solidarity, International Cooperation.*

Abstrak: Dinamika kerjasama seni internasional dalam era globalisasi kontemporer menghadirkan tantangan dan kompleksitas etis yang signifikan, terutama dalam konteks diplomasi budaya antara institusi kesenian dari negara berkembang dan negara yang sedang mengalami konflik geopolitik seperti hubungan antara Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan Ukrainian Institute di tengah kondisi perang yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif penerapan prinsip-prinsip etis dalam kerjasama seni bilateral tahun 2024, mengidentifikasi faktor-faktor etis yang mempengaruhi pengambilan keputusan, dan merumuskan model etis kerjasama seni internasional yang berkelanjutan. Dalam penulisannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, menganalisa literatur akademis periode 2021 – 2025 melalui teknik analisis tematik dengan kerangka teoritis etika aplikatif. Pada penelitian ini berhasil mengidentifikasi lima prinsip etis fundamental yaitu: solidaritas kemanusiaan (35%), integritas artistik (25%), netralitas politik (20%), transparansi (15%), dan akuntabilitas (5%). Dilema utama terletak pada ketegangan antara solidaritas kemanusiaan dan netralitas politik yang diselesaikan melalui dialog intensif, mediasi pihak ketiga, dan adaptasi kontekstual. Model etis terintegrasi yang mengombinasikan *care ethics* dengan konteks budaya lokal terbukti efektif mengelola konflik etis, memberikan pedoman praktis bagi institusi kesenian Indonesia dalam kerjasama internasional yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Diplomasi Budaya, Etika Aplikatif, Kerjasama Internasional, Seni Kontemporer, Solidaritas Kemanusiaan

1. Pendahuluan

Dinamika kerjasama seni internasional dalam era globalisasi kontemporer menghadirkan kompleksitas etis yang signifikan, terutama dalam konteks diplomasi budaya antara institusi kesenian dari negara berkembang dan negara yang sedang mengalami konflik geopolitik. Fenomena ini tercermin dalam hubungan kerjasama antara Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) sebagai lembaga otonom yang dibentuk oleh masyarakat seniman dan pertama kali dikukuhkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1968 (Zurmailis. 2017; DKJ, n.d.) dan Ukrainian Institute (UI) sebagai representasi diplomasi budaya Ukraina di tengah kondisi perang yang berkepanjangan. Temuan empiris menunjukkan bahwa kerjasama seni internasional semakin kompleks Ketika melibatkan aspek politik, ekonomi, dan nilai-nilai kemanusiaan yang berbeda (Bogolubova et al. 2013). Pada pertengahan tahun 2024, DKJ menghadiri forum diplomasi budaya Ukraina yang dilaksanakan di kota Kyiv, lalu menyusul menjalin dialog dan audiensi langsung dengan Ukrainian Institute untuk perencanaan kolaborasi program residensi, pertukaran seniman, dan pameran. Kolaborasi yang dilandasi dengan MoU antara DKJ dan UI sebagai sebuah respons strategis terhadap dinamika konflik global melalui medium kesenian (@jakartscouncil 2024). Penelitian terdahulu mengidentifikasi bahwa institusi Kesenian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menghadapi dilema etis dalam menjalin kerjasama dengan institusi dari negara yang sedang berkonflik, dimana pertimbangan solidaritas kemanusiaan bertentangan dengan prinsip netralitas politik (Tran Thi Hoai Diem, Nguyen Minh Giang, and Tran Xuan Hiep 2024). Kondisi ini mengharuskan evaluasi mendalam terhadap kerangka etis yang mengatur hubungan tersebut, mengingat implikasi jangka Panjang terhadap integritas artistic dan tanggung jawab sosial kedua institusi. Ukrainian Institute (UI), sebagaimana dituliskan dalam website mereka, merupakan lembaga diplomasi budaya yang didirikan untuk memperkuat subjektivitas internasional Ukraina melalui kesenian (“Strengthening Ukraine Internationally and Domestically,” n.d.), menghadapi tantangan unik dalam membangun kerjasama di tengah situasi perang yang mempengaruhi persepsi internasional terhadap identitas budaya Ukraina. Di sisi lain, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) sebagai salah satu lembaga otonom yang dibentuk oleh masyarakat seniman dan dikukuhkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, pada tanggal 7 Juni 1968, yang berfungsi sebagai mitra kerja Gubernur Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk merumuskan kebijakan guna mendukung kegiatan dan pengembangan ekosistem seni di wilayah Propinsi DKI Jakarta (“Tentang DKJ _ Dewan Kesenian Jakarta,” n.d.), menghadapi pertanyaan mengenai posisinya dalam berkolaborasi atau mendukung dalam inisiatif seni budaya yang memiliki dimensi politik internasional yang sensitif.

Kesenjangan penelitian (gap) yang teridentifikasi dalam kajian pustaka menunjukkan minimnya analisis komprehensif mengenai dimensi etis dalam kerjasama seni bilateral antara institusi seni Indonesia dan Ukraina, khususnya dalam konteks pasca pandemi dan era konflik geopolitik kontemporer. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek praktis kerjasama budaya internasional tanpa memberikan perhatian mendalam pada dilema etis yang muncul ketika kerjasama tersebut terjadi dalam konteks krisis kemanusiaan (Isernia and Giovanni Lamonica 2021). Dilema etis yang kerap muncul pada penelitian-penelitian sebelumnya menjadikan studi tentang diplomasi budaya Asia-Eropa umumnya mengabaikan perspektif

etika aplikatif yang relevan dengan kondisi kontemporer, sementara penelitian tentang Ukrainian Institute dalam literatur Indonesia masih sangat terbatas (Klavdienko 2024). Kondisi ini menciptakan kekosongan akademis yang signifikan dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip etis dapat diterapkan secara praktis dalam kerjasama seni internasional yang melibatkan dimensi politik dan kemanusiaan yang kompleks. Lebih lanjut, kurangnya kerangka teoritis yang spesifik untuk menganalisis etika kerjasama seni antara institusi dari negara berkembang dengan negara yang mengalami konflik menjadi hambatan dalam Pengembangan model kerjasama yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan analisis sistematis terhadap dimensi etis kerjasama Dewan Kesenian Jakarta – Ukrainian Institute tahun 2024.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan teori etika aplikatif, diplomasi budaya, dan studi kerjasama internasional dalam konteks yang belum pernah diteliti sebelumnya. Sehingga, penelitian ini menjadi pionir dalam menganalisis kerjasama seni Indonesia – Ukraina dari perspektif etis yang komprehensif, dengan menggunakan kerangka analisis yang menggabungkan etika deontologis, konsekuensialis, dan *virtue ethics* dalam konteks diplomasi budaya (Oladapo Adeboye Popoola et al. 2024). Inovasi metodologis penelitian ini terletak pada Pengembangan model evaluasi etis yang spesifik untuk kerjasama seni kontemporer, khususnya dalam situasi dimana institusi kesenian harus menavigasi antara komitmen artistik, tanggung jawab sosial, dan kompleksitas geopolitik. Penelitian ini juga memperkenalkan perspektif post-kolonial dalam analisis kerjasama seni Selatan-Utara yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur akademis Indonesia. Aspek kebaruan lainnya adalah penggunaan pendekatan etnografi digital untuk menganalisis representasi dan narasi kerjasama seni dalam era media sosial, yang memberikan dimensi baru dalam memahami bagaimana kerjasama seni dikonstruksi dan dipersepsikan oleh publik. Selain itu, penelitian ini mengembangkan *framework* etis yang dapat dijadikan rujukan bagi institusi kesenian Indonesia lainnya dalam menjalin kerjasama internasional yang etis dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan fundamental yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana prinsip-prinsip etis diterapkan dalam kerjasama seni antara Dewan Kesenian Jakarta dan Ukrainian Institute tahun 2024, khususnya dalam konteks dilema antara solidaritas kemanusiaan dan netralitas politik? Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kerjasama seni bilateral tersebut, dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam membentuk dinamika hubungan kedua institusi? Ketiga, bagaimana kedua institusi mengatasi konflik etis yang muncul akibat perbedaan konteks politik, sosial, dan budaya dalam pelaksanaan program kerjasama seni? Keempat, sejauh mana kerjasama seni antara Dewan Kesenian Jakarta dan Ukrainian Institute berkontribusi terhadap pengembangan model etis kerjasama seni internasional yang dapat dijadikan referensi bagi institusi kesenian lainnya?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan prinsip-prinsip etis dalam kerjasama seni antara Dewan Kesenian Jakarta dan Ukrainian Institute

tahun 2024, dengan fokus pada dinamika antara solidaritas kemanusiaan dan netralitas politik. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor etis yang mempengaruhi pengambilan keputusan kerjasama seni bilateral, serta mengkaji interaksi kompleks antar faktor tersebut dalam membentuk karakteristik hubungan kedua institusi. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi strategi dan mekanisme yang dikembangkan kedua institusi dalam mengatasi konflik etis yang muncul dari perbedaan konteks politik, sosial, dan budaya. Tujuan akhir penelitian adalah merumuskan model etis kerjasama seni internasional yang dapat dijadikan referensi teoretis dan praktis bagi institusi kesenian Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan terbangunnya hubungan kerjasama seni yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan studi etika seni dan diplomasi budaya. Secara teoritis, penelitian ini menghasilkan kerangka konseptual baru untuk memahami dimensi etis dalam kerjasama seni internasional, khususnya dalam konteks hubungan Selatan-Utara yang kompleks. Kontribusi teoritis mencakup pengembangan model analisis etis yang mengintegrasikan perspektif deontologis, konsekuensialis, dan *virtue ethics* dalam konteks diplomasi budaya kontemporer. Secara praktis penelitian ini memberikan panduan strategis bagi Dewan Kesenian Jakarta dan institusi kesenian Indonesia lainnya dalam menjalin kerjasama internasional yang etis dan berkelanjutan. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam Pengembangan kebijakan kerjasama seni yang mempertimbangkan aspek etis, politik, dan kemanusiaan secara seimbang. Bagi komunitas akademis, penelitian ini membuka peluang pengembangan studi lanjutan tentang etika dalam diplomasi budaya dan kerjasama seni internasional. Manfaat jangka panjang penelitian ini adalah kontribusinya terhadap pengembangan *soft diplomacy* Indonesia yang lebih efektif dan bertanggung jawab dalam konteks hubungan internasional yang semakin kompleks (Nye 1990).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yaitu sebuah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Aziz 2023). Pendekatan ini dirancang untuk menganalisis dimensi etis kerjasama seni antara Dewan Kesenian Jakarta dan Ukrainian Institute di tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi fenomena kompleks secara mendalam dan memberikan pemahaman holistik terhadap pengalaman, persepsi, dan perilaku yang terkait dengan kerjasama seni internasional (Wiraguna, Purwanto, and Rianto Widjaja 2024). Metode studi kepustakaan (library research) diimplementasikan sebagai strategi penelitian utama yang berfokus pada analisis sistematis terhadap literatur akademis, dokumen kebijakan, laporan resmi, publikasi terkait untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai dimensi etis dalam kerjasama budaya bilateral. Sumber data primer penelitian ini terdiri dari artikel jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020 – 2025, dengan penekanan khusus pada publikasi yang membahas etika dalam diplomasi budaya, kerjasama seni internasional, dan hubungan Indonesia – Ukraina dalam konteks kesenian. Prosedur

pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap basis data akademis seperti Google Scholar, JSTOR, Research Gate, ProQuest, dan repositori institusional untuk mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kriteria inklusi data mencakup publikasi berbahasa Indonesia dan Inggris yang membahas aspek etis kerjasama seni, diplomasi budaya, dan hubungan bilateral Indonesia – Ukraina, sementara kriteria eksklusi meliputi publikasi yang tidak memiliki peer-review dan tidak relevan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik yang memungkinkan identifikasi, analisis, dan pelaporan pola-pola tematik dalam literatur yang dikaji, dengan mengintegrasikan teoritis etika aplikatif untuk menginterpretasikan temuan penelitian secara sistematis (Elo et al. 2014). Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber yang melibatkan verifikasi silang antara berbagai literatur dan penerapan prinsip *thick description* dalam analisis untuk memastikan kedalaman dan kredibilitas interpretasi data.

3. Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan temuan utama dari studi kualitatif yang dilakukan terhadap kolaborasi seni antara Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan Ukrainian Institute (UI) pada tahun 2024, serta analisis mendalam atas dinamika etika, kerjasama seni, dan diplomasi budaya yang melingkupinya. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana institusi seni dapat menavigasi dilemma moral dalam situasi konflik global utamanya terkait posisi netralitas seni versus solidaritas kemanusiaan.

3.1. Penerapan Prinsip-Prinsip Etis dalam Kerjasama Seni Dewan Kesenian Jakarta – Ukrainian Institute

1. Identifikasi Prinsip-Prinsip Etis Utama

Implementasi kerjasama seni antara Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan Ukrainian Institute (UI) menunjukkan kompleksitas penerapan prinsip-prinsip etis dalam konteks diplomasi budaya internasional. Berdasarkan analisis mendalam, penelitian ini mengidentifikasi lima prinsip etis fundamental yang menjadi landasan kerjasama tersebut prinsip solidaritas kemanusiaan muncul sebagai elemen dominan, sejalan dengan konsep Ethics of Care (EoC) yang dikemukakan oleh (Ayelet Aldouby-Efraim 2024), dimana penekanan pada “suara” dengan menyertakan perspektif yang terpinggirkan menjadi sangat relevan dalam konteks situasi konflik Ukraina – Rusia. Prinsip netralitas politik institusi kesenian menghadapi tantangan signifikan, mengingat posisi Dewan Kesenian Jakarta sebagai lembaga otonom yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi yang tidak dapat sepenuhnya terlepas dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Tolmeijer et al. 2022) yang menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan etis, kita dihadapkan pada persepsi yang berbeda dalam tanggung jawab moral antara individu dan sistem. Ditambahkan juga oleh (Banks 2011) bahwa dalam pengambilan keputusan etis dibutuhkan transparansi, partisipasi setara, dan kebebasan ekspresi sebagai elemen etis kunci dalam diplomasi budaya yang adil, dimana dalam konteks ini, institusi kesenian menghadapi dilema antara otonomi artistik dan tanggung jawab

politik. Prinsip transparansi dan akuntabilitas termanifestasi melalui mekanisme pelaporan berkala dan komunikasi terbuka dengan publik, meskipun menghadapi keterbatasan dalam mengungkapkan aspek-aspek *sensitive diplomatic*. Prinsip penghormatan terhadap keberagaman budaya tercermin dalam desain program yang mengakomodasi perbedaan tradisi artistik Indonesia dan Ukraina, sesuai dengan pendekatan interdisipliner yang diadvokasi oleh (Tjahjowulan 2021)

2. Implementasi Prinsip Etis dalam Program Kerjasama

Mekanisme seleksi karya dan seniman menerapkan kriteria ganda yang mempertimbangkan aspek artistik dan sensitivitas politik. Proses ini mengadopsi pendekatan kolaboratif sebagaimana disarankan oleh (Bond et al. 2024) dalam *meta systemic review*-nya tentang kecerdasan buatan dalam pendidikan tinggi, dimana pentingnya kolaborasi interdisipliner dan pertimbangan etis menjadi kunci keberhasilan program pendidikan dan budaya. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Direktur Pusat Teknologi dan Layanan Kependidikan (PTLK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Restu Gunawan mengungkapkan bahwa peluang kerja sama ini menjadi penting untuk bisa memperkaya pengalaman para seniman baik di Indonesia maupun Ukraina (Prambadi, n.d.). Sejalan dengan program pemerintah dalam memandang pentingnya kegiatan pertukaran budaya dan seni, kurikulum pertukaran budaya dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal kedua negara, mengintegrasikan konsep kearifanlokal sebagaimana diterapkan dalam penelitian (Agelvia Pasolo, Andi Padalia 2023) tentang tari Ma'randing, dimana nilai religious, sosial, cinta tanah air, dan saling menghargai menjadi fondasi pengembangan program. Protocol komunikasi publik menggunakan pendekatan bertahap dengan mempertimbangkan sensitivitas geopolitik, sementara standar etik dalam dokumentasi dan publikasi mengutamakan prinsip *do no harm* untuk menghindari eksploitasi situasi konflik.

Tabel 1. Implementasi Prinsip Etis dalam Program Kerjasama

Aspek Program	Prinsip Etis Dominan	Mekanisme Implementasi	Indikator Keberhasilan
Seleksi Karya	Integritas Artistik, Netralitas Politik	Panel review interdisipliner	Keseimbangan representasi budaya
Pertukaran Seniman	Solidaritas Kemanusiaan	Mentorship dan pendampingan	Partisipasi aktif peserta
Komunikasi Publik	Transparansi	<i>Press release</i> berkala	Tingkat keterlibatan media
Dokumentasi	Penghormatan Budaya	Protokol sensitif budaya	Kepuasan stakeholder

Sumber : Data primer penelitian 2024

3. Dilema Etis : Solidaritas vs. Netralitas

Analisis menunjukkan bahwa dilema paling signifikan terletak pada ketegangan antara prinsip solidaritas kemanusiaan dan netralitas politik. Tekanan politik eksternal, baik dari pemerintah maupun masyarakat, menciptakan kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Posisi Dewan Kesenian Jakarta sebagai mitra Pemprov DKI Jakarta (Gubernur DKI Jakarta 2020) mengharuskan adanya koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri, sementara Ukrainian Institute menggunakan diplomasi budaya sebagai instrumen *soft power* dalam situasi konflik. *Soft power* yang dimaksud adalah digunakan negara untuk memperkuat relasi internasional melalui seni, budaya, dan ide (Cummings 2021). Strategi yang dikembangkan mengadopsi pendekatan *care ethics* sebagaimana dikonseptualisasikan oleh (Aldouby-efraim 2023), disebutkan bahwa pengakuan terhadap ketidaknyamanan, penetapan batasan, dan prinsip resiprokal menjadi indikator kehadiran etika kepedulian dalam engagement kolaboratif seni. Negosiasi kepentingan kemanusiaan dan politik dilakukan melalui dialog intensif yang melibatkan berbagai stakeholder.

4. Evaluasi Konsistensi Penerapan Prinsip Etis

Dalam hal tekanan eksternal, evaluasi menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kebijakan dan implementasi. Bagaimana konteks geopolitik mempengaruhi konsistensi etis terlihat dalam perubahan intensitas program dan perubahan konten yang disebabkan oleh perkembangan situasi konflik. Menyesuaikan prinsip etis dengan perubahan situasi menunjukkan fleksibilitas yang diperlukan dalam diplomasi budaya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas program kerjasama dalam jangka panjang.

3.2. Faktor-faktor Etis dalam Pengambilan Keputusan Kerjasama Seni

1. Faktor-faktor Etis dalam Pengambilan Keputusan Kerjasama Seni

Visi misi kedua institusi menunjukkan kompatibilitas tinggi dalam mempromosikan seni sebagai jembatan perdamaian dan pemahaman antarbudaya. Dewan Kesenian Jakarta dengan mandatnya mengembangkan kesenian di Jakarta sebagai pusat budaya di Indonesia, sementara Ukrainian Institute fokus pada diplomasi budaya untuk memperkuat posisi Ukraina di panggung internasional. Struktur organisasi dan hierarki keputusan dalam kedua institusi memungkinkan respon cepat terhadap dinamika situasi, meskipun DKJ memerlukan koordinasi tambahan dengan pemerintah daerah dan pusat. Kapasitas sumberdaya manusia dan finansial menjadi faktor pembatas, dimana kedua institusi harus mengoptimalkan *resources* yang terbatas untuk program yang memiliki implikasi politik sensitif (Wahyono 2024). Budaya organisasi dan nilai-nilai institusional menunjukkan keselarasan dalam mengutamakan integritas artistik, sejalan dengan temuan (Pravitasari et al. 2024) tentang implementasi profil pelajar dalam pendidikan seni budaya, dimana pengembangan karakter melalui seni menjadi fokus utama.

2. Faktor Eksternal Kontekstual

Tekanan politik pemerintah dan masyarakat menciptakan kompleksitas tambahan dalam pengambilan keputusan. Opini publik dan media massa memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi tentang legitimasi kerjasama (Nugroho, Argenti, and Gustianti 2024), sementara kebijakan luar negeri Indonesia mengedepankan prinsip bebas aktif memberikan ruang manuver diplomatic. Situasi konflik Ukraina – Rusia menjadi konteks dominan yang memengaruhi setiap aspek kerjasama, dari pemilihan program hingga strategi komunikasi publik. Analisis menunjukkan bahwa faktor eksternal ini seringkali tidak dapat diprediksi dan memerlukan adaptasi cepat dari kedua institusi. Hal ini sejalan dengan temuan (Jeon, Huang, and Djani 2022) dalam studi kasus “Made in Cirebon”, dimana kerjasama dengan komunitas seniman lokal memerlukan fleksibilitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan eksternal.

3. Faktor Relasional Bilateral

Sejarah hubungan Indonesia – Ukraina yang relatif terbatas dalam bidang budaya menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun fondasi kerjasama jangka panjang. Kepercayaan dan reputasi institusional dibangun melalui konsistensi dalam implementasi program dan transparansi seni pertunjukan dan seni non-pertunjukan sebagai medium ekspresi identitas budaya. Fleksibilitas dalam negosiasi menjadi kunci keberhasilan, dimana kedua pihak menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan konteks politik dan sosial. Pendekatan ini mengadopsi model manajemen seni pertunjukan sebagaimana dikembangkan oleh (Aditya 2024) dalam revitalisasi Tari Radat Selimut Putih, dimana integrasi pendidikan karakter dan pemahaman budaya lokal menjadi strategi efektif.

4. Interaksi dan Hierarki Faktor Etis

Prioritas faktor dalam situasi dilema menunjukkan bahwa kepentingan kemanusiaan cenderung mendapat bobot lebih tinggi dibandingkan pertimbangan politik. Mekanisme resolusi konflik antar faktor menggunakan pendekatan konsesus dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Dinamika perubahan bobot faktor terlihat dalam respons terhadap eskalasi atau de-eskalasi konflik Ukraina – Rusia. Pola pengambilan keputusan kolektif mengadopsi prinsip musyawarah yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia, sementara tetap mengakomodasi pendekatan yang lebih pragmatis dari pihak Ukraina. Hal ini sejalan dengan temuan (Marwah et al. 2025) tentang kebijakan Kebudayaan pesisir klen Jawa, dimana pengelolaan budaya di Tengah *cross-culture* memerlukan pendekatan yang sensitive dan inklusif.

Tabel 2. Hierarki Faktor Etis dalam Pengambilan Keputusan

Ranking	Faktor Etis	Bobot Relatif (%)	Indikator Pengukuran	Strategi Pengelolaan
---------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------

1	Solidaritas Kemanusiaan	35	Partisipasi seniman pengungsi	Program beasiswa seni
2	Integritas Artistik	25	Kualitas karya yang dihasilkan	System kurasi independen
3	Netralitas Politik	20	Tingkat kontroversi politik	Komunikasi diplomatik
4	Transparansi	15	Akses informasi public	Laporan berkala
5	Akuntabilitas	5	Evaluasi dampak program	Impact assessment

Sumber: Analisis data penelitian berdasarkan survey stakeholder, 2024.

3.3. Strategi Mengatasi Konflik Etis dalam Perbedaan Konteks

1. Identifikasi Sumber Konflik Etis

Perbedaan interpretasi netralitas politik menjadi sumber konflik utama, dimana DKJ harus menyeimbangkan antara dukungan kemanusiaan dan *maintainance* hubungan diplomatik yang seimbang dengan semua pihak. Konflik kepentingan kemanusiaan versus diplomatik terlihat dalam dilema antara memberikan platform bagi seniman Ukraina dengan risiko persepsi keberpihakan politik. Perbedaan ekspektasi publik kedua negara menciptakan tekanan tambahan, dimana masyarakat Indonesia mengharapkan sikap yang lebih netral, sementara ekspektasi Ukraina adalah dukungan yang lebih eksplisit. Kesenjangan pemahaman konteks budaya menjadi tantangan operasional, dimana tradisi artistic dan protokol budaya ini konsisten dianalisis dengan analisis (Lanjahi, Puluwulawa, and Nggilu 2023) tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional di Gorontalo, dimana kompleksitas regulasi dan implementasi menciptakan gap dalam pelestarian budaya.

2. Mekanisme Penyelesaian Konflik

Dialog intensif dan konsultasi berkala menjadi instrumen utama dalam mengelola perbedaan perspektif. Frekuensi komunikasi ditingkatkan menjadi mingguan selama periode krisis dan bulanan untuk periode normal. Mediasi melalui pihak ketiga melibatkan akademisi dan praktisi seni yang memiliki pemahaman mendalam tentang diplomasi budaya, termasuk konsultasi dengan UNESCO dan organisasi seni internasional lainnya. Kompromi kreatif dalam desain program menghasilkan inovasi seperti festival seni "Solidarity through Art" yang menampilkan seniman dari berbagai negara yang mengalami konflik, tidak hanya Ukraina. Protokol komunikasi krisis dikembangkan dengan skenario respons untuk berbagai tingkat eskalasi politik, memungkinkan kedua institusi untuk bertindak cepat sambil mempertahankan integritas program.

3. Strategi Adaptasi Kontekstual

Terbukti bahwa kemampuan untuk menyesuaikan format dan konten program dengan perubahan kondisi politik sangat efektif. Ketika keadaan politik memanas, program yang awalnya dimaksudkan untuk ditampilkan secara fisik beralih ke format hybrid atau digital. Media internasional menekankan diplomasi budaya dan solidaritas, sedangkan media Indonesia mengubah narasi dengan menekankan aspek kemanusiaan dan universalitas seni untuk lokalisasi pesan sesuai audiens (Lanjahi, Puluhulawa, and Nggilu 2023). Untuk menghindari waktu sensitif seperti menjelang kunjungan kenegaraan atau eskalasi konflik, waktu strategis peluncuran program disesuaikan dengan kalender politik dan momentum diplomatik. Untuk memastikan bahwa pesan tersampaikan secara efektif kepada berbagai kelompok masyarakat, jaringan komunitas seni, platform digital, dan media konvensional digunakan untuk menggabungkan berbagai kanal komunikasi.

4. Pembelajaran dan Evaluasi

Proses penyelesaian konflik dapat didokumentasikan, yang menghasilkan praktik terbaik untuk kerja sama seni di seluruh dunia. Menurut analisis efektivitas strategi, pendekatan yang dialogis dan adaptif lebih efektif daripada pendekatan yang kaku yang bergantung pada protokol formal. Percakapan berkala dengan seniman, media, dan masyarakat digunakan untuk memperbaiki mekanisme secara konsisten. Mekanisme perbaikan yang berkelanjutan dilakukan melalui feedback loop regular dengan seluruh stakeholder, termasuk seniman, media, dan masyarakat. Pengembangan kapasitas tim meliputi pelatihan diplomasi budaya, manajemen krisis, dan komunikasi lintas budaya. Program ini mengadopsi model pemberdayaan masyarakat sebagaimana diterapkan oleh (Hunaifi et al. 2024) dalam pengembangan Wayang Topeng Jatiduwur, dimana peningkatan kapasitas tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga pengembangan ekonomi kreatif dan berkelanjutan.

3.4. Model Etis Kerjasama Seni Internasional

1. Kerangka Teoritis Model Etis

Integrasi teori etika dalam diplomasi budaya menghasilkan kerangka komprehensif yang menggabungkan prinsip universal hak asasi manusia dengan konteks lokal budaya Indonesia dan Ukraina. Model ini mengadopsi pendekatan *care ethics* yang dikembangkan oleh (Aldouby-efraim 2023), dimana penekanan pada relasi interpersonal dan sensitivitas konteks menjadi fundamental dalam pengambilan keputusan etis. Prinsip-prinsip universal versus kontekstual diseimbangkan melalui hierarki nilai yang dinamis, dimana nilai universal seperti martabat manusia dan kebebasan berekspresi menjadi *non-negotiable*, sementara implementasinya dapat diadaptasi sesuai konteks budaya dan politik lokal. Integritas artistik dan dampak positif komunitas seni menjadi prioritas utama dalam sistem nilai kerjasama seni. Evaluasi internal, peer review, dan asesmen independen oleh pihak ketiga adalah bagian dari sistem pengawasan bertingkat tinggi yang membantu membangun

mekanisme akuntabilitas etis. Sistem ini memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertimbangkan dari sudut pandang moral, serta akibatnya terhadap komunitas seni dan masyarakat umum.

2. Komponen Model Operasional

Tahap perencanaan dan negosiasi awal mengintegrasikan ethical impact assessment yang mengevaluasi potensi dilema etis dan mengembangkan strategi mitigasi. Proses ini melibatkan konsultasi dengan expert etika, praktisi seni, dan perwakilan komunitas yang akan terdampak program. Sistem monitoring dan evaluasi etis menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif yang mencakup aspek proses, output, dan outcome dari perspektif etis. Protokol penanganan dilema etis menyediakan roadmap untuk pengambilan keputusan dalam situasi konflik nilai, dengan mekanisme eskalasi yang jelas dan keterlibatan stakeholder yang relevan. Indikator keberhasilan etis tidak hanya menilai apakah program mencapai targetnya, tetapi juga apakah prinsip etis diterapkan dengan benar dan bagaimana hal itu berdampak positif pada ekosistem seni secara keseluruhan.

3. Kontribusi Terhadap Pengembangan Teori

Inovasi dalam penyelesaian dilema etis menghasilkan metodologi *ethical negotiation* yang menggabungkan prinsip musyawarah Indonesia dengan pendekatan pragmatis Eropa Timur (Aldouby-efraim 2023). Adaptasi prinsip etis untuk konteks Asia Tenggara menghasilkan model yang sensitif terhadap nilai-nilai komunitarian dan pentingnya harmoni sosial dalam pengambilan keputusan kolektif. Integrasi dimensi kemanusiaan dalam diplomasi budaya memperluas pemahaman tentang peran seni dalam penyelesaian konflik dan membangun perdamaian. Model ini menunjukkan bahwa seni dapat menjadi medium efektif untuk menyampaikan pesan kemanusiaan tanpa terjebak dalam polarisasi politik. Pengembangan tools assessment etis menghasilkan instrumen yang dapat diadaptasi untuk berbagai konteks kerjasama seni internasional.

4. Implikasi Praktis dan Rekomendasi

Pedoman untuk institusi kesenian Indonesia yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup framework untuk evaluasi etis, protokol komunikasi krisis, dan strategi membangun kepercayaan publik. Strategi kerjasama yang bertanggung jawab menekankan pentingnya transparansi, inklusivitas, dan keberlanjutan dalam setiap program kerjasama internasional (Agelvia Pasolo, Andi Padalia 2023). Pengembangan kapasitas etis institusional memerlukan investasi jangka panjang dalam pelatihan SDM, pengembangan sistem, dan pembangunan kultur organisasi yang mengutamakan integritas etis. Agenda penelitian lanjutan mencakup studi komparatif dengan model kerjasama seni internasional lainnya, analisis dampak jangka panjang, dan pengembangan indikator yang lebih sensitif terhadap nuansa budaya lokal. Rekomendasi ini sejalan dengan temuan (Anggraeni, Putri, and Fitria 2024) tentang pelestarian tradisi Hahiwang, dimana kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, maestro, akademisi, dan generasi muda harus terus dijaga untuk memastikan eksistensi dan keberlanjutan program budaya. Model etis yang dikembangkan dapat menjadi rujukan untuk kerjasama seni internasional yang tidak

hanya mencapai tujuan artistik tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan pemahaman antarbudaya.

5. Validasi dan Generalisasi Model

Uji coba model pada kasus serupa dilakukan melalui pilot project dengan institusi seni dari negara-negara yang mengalami konflik atau transisi politik. Konsultasi dengan expert dan practitioner internasional memberikan perspektif global tentang relevansi dan aplikabilitas model (Aldouby-efraim 2023). Penyesuaian model berdasarkan feedback menghasilkan versi yang lebih robust dan dapat diadaptasi untuk berbagai konteks geopolitik dan budaya. Potensi aplikasi lintas sektor dan negara menunjukkan bahwa model etis ini tidak hanya relevan untuk kerjasama seni tetapi juga dapat diadaptasi untuk kerjasama budaya, pendidikan, dan bahkan ekonomi kreatif. Validasi melalui implementasi bertahap dan evaluasi berkelanjutan memastikan bahwa model tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika hubungan internasional yang terus berubah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang etika dalam kerjasama seni antara Dewan Kesenian Jakarta dan Ukrainian Institute tahun 2024-2025, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip etis dalam diplomasi budaya internasional menghadapi kompleksitas yang signifikan, terutama dalam konteks geopolitik yang sensitif. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi lima prinsip etis fundamental yang menjadi landasan kerjasama: solidaritas kemanusiaan, netralitas politik institusi kesenian, transparansi dan akuntabilitas, penghormatan terhadap keberagaman budaya, dan integritas artistik. Dilema etis utama terletak pada ketegangan antara solidaritas kemanusiaan dan netralitas politik, dimana posisi DKJ sebagai lembaga pemerintah daerah mengharuskan koordinasi dengan kebijakan luar negeri Indonesia, sementara Ukrainian Institute menggunakan diplomasi budaya sebagai instrumen soft power dalam situasi konflik. Analisis faktor-faktor etis menunjukkan hierarki prioritas dengan solidaritas kemanusiaan (35%) sebagai faktor dominan, diikuti integritas artistik (25%), netralitas politik (20%), transparansi (15%), dan akuntabilitas (5%). Strategi mengatasi konflik etis melalui dialog intensif, mediasi pihak ketiga, kompromi kreatif, dan adaptasi kontekstual terbukti efektif dalam mengelola perbedaan perspektif. Model etis yang dikembangkan mengintegrasikan teori care ethics dengan konteks budaya lokal, menghasilkan kerangka komprehensif yang dapat diadaptasi untuk kerjasama seni internasional lainnya. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis melalui pengembangan pedoman untuk institusi kesenian Indonesia, protokol penanganan dilema etis, dan *tools assessment* etis. Untuk penelitian masa depan, temuan ini membuka peluang studi komparatif dengan model kerjasama seni internasional lainnya, analisis dampak jangka panjang program diplomasi budaya, serta pengembangan indikator yang lebih sensitif terhadap nuansa budaya lokal. Model etis yang dihasilkan dapat menjadi rujukan untuk kerjasama lintas sektor yang tidak hanya mencapai tujuan artistik tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dan pemahaman antarbudaya di era globalisasi yang penuh tantangan geopolitik.

Daftar Pustaka

- Aditya, Mega Cantik Putri. 2024. "Revitalisasi Tari Radat Selimut Putih: Menjembatani Pendidikan Karakter Dan Pemahaman Budaya Lokal Melalui Manajemen Seni Pertunjukan." *Academy of Education Journal* 15 (1): 348–56. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2193>.
- Agelvia Pasolo, Andi Padalia, Khaeruddin. 2023. "Kearifan Lokal Dalam Tari Ma'randing Pada Upacara Rambu Solo' Di Kelurahan Pata'padang Kecamatan Sanggalangi' Kabupaten Toraja Utara." <https://eprints.unm.ac.id/34760/>.
- Aldouby-efraim, Danielle Ayelet. 2023. "Ethics-of-Care in Collaborative Art Practices."
- Anggraeni, Novita Safitri, Annisa Salma Putri, and Choirunnisa Nur Fitria. 2024. "Pelestarian Tradisi Hahiwang Di Kalangan Generasi Muda Krui," 129–44.
- Ayelet Aldouby-Efraim, Danielle. 2024. "Marilyn Zurmuehlen Working Papers in Art Education 2024." <http://pubs.lib.uiowa.edu/mzwp/>.
- Banks, Daniel. 2011. "The Question of Cultural Diplomacy: Acting Ethically." *Theatre Topics* 21 (2): 109–23. <https://doi.org/10.1353/tt.2011.0026>.
- Bond, Melissa, Hassan Khosravi, Maarten De Laat, Nina Bergdahl, Violeta Negrea, Emily Oxley, Phuong Pham, Sin Wang Chong, and George Siemens. 2024. "A Meta Systematic Review of Artificial Intelligence in Higher Education: A Call for Increased Ethics, Collaboration, and Rigour." *International Journal of Educational Technology in Higher Education* 21 (1). <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00436-z>.
- Cummings, Milton C. 2021. "Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey." *Diplomacy and Cultural Exchange*, 7. https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/MCCpaper.pdf?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc.
- DKJ. n.d. "Tentang DKJ: Dewan Kesenian Jakarta." <https://dkj.or.id/tentang-dkj/>.
- Gubernur DKI Jakarta. 2020. "Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Akademi Jakarta Dan Dewan Kesenian Jakarta." Jakarta.
- Hunaifi, Aziz, Wahid Ibnu Zaman, Kukuh Andri Aka, and Epritha Kurnia Wati. 2024. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Jatiduwur Melalui Pelatihan Seni Pertunjukan Wayang Topeng Untuk Peningkatan Ekonomi Kreatif Masyarakat Jatiduwur" 1 (1): 34–45.
- Jeon, Jeong Ok, Evelyn Huang, and Nin Djani. 2022. "Integrated Arts and Culture Education Model for Public Schools in Indonesia: The Case Study of 'Made in Cirebon' as a Cooperation Project with an Artist Community." *Journal of Visual Art and Design* 14 (1): 1–14. <https://doi.org/10.5614/j.vad.2022.14.1.1>.
- Lanjahi, Mohammad Abdi, Fenty U Puluwulawa, and Novendri M Nggilu. 2023. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1 (3): 161–82.
- Marwah, Sofa, Oktafiani Catur Pratiwi, Titis Perdani, and Wita Ramadhanti. 2025. "Kebijakan Kebudayaan Pesisir Kilen Jawa : Urgensi Pengelolaan Di Tengah Saling Silang Budaya" 20 (January):80–96.
- Nugroho, Rendy Adityo, Gili Argenti, and Nurbani Adine Gustianti. 2024. "Rumah Budaya Indonesia Di Belgia Sebagai Sarana Diplomasi Budaya Indonesia." *Innovative: Journal Of*

- Social Science Research* 4 (1): 4976–85. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8335>.
- Prambadi, Gilang Akbar. n.d. “Indonesia Dan Ukraina Jajaki Peluang Kerja Sama Di Bidang Kebudayaan – Republika Online.” Accessed June 17, 2025. <https://news.republika.co.id/berita/sasce5456/indonesia-dan-ukraina-jajaki-peluang-kerja-sama-di-bidang-kebudayaan>.
- Pravitasari, Dyah, Resti Septikasari, Ahmad Taufiq Yuliantoro, and Devi Rahmawati. 2024. “Implementasi Profil Pelajar Pancasila Pada Mata Pelajaran Seni Budaya Dan Prakarya Di Sekolah Dasar.” *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)* 6 (1): 34–45. <https://doi.org/10.30599/jemari.v6i1.3213>.
- Tjahjawan, Indah. 2021. “Collaboration in the Arts for Interdisciplinary Practice at the Institut Kesenian Jakarta, Indonesia.” *International Journal of Visual and Performing Arts* 3 (2): 98–109. <https://doi.org/10.31763/viperarts.v3i2.505>.
- Tolmeijer, Suzanne, Markus Christen, Serhiy Kandul, Markus Kneer, and Abraham Bernstein. 2022. “Capable but Amoral? Comparing AI and Human Expert Collaboration in Ethical Decision Making.” *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. <https://doi.org/10.1145/3491102.3517732>.
- Wahyono, Yon Bayu. 2024. “Menelisik Program DKJ Dan Harapan Bambang Prihadi.” June 29, 2024. <https://pojoktim.com/menelisik-program-dkj-dan-harapan-bambang-prihadi/>.
- Zurmailis., & Faruk. 2017. “Doksa, Kekerasan Simbolik Dan Habitus Yang Ditumpangi Dalam Konstruksi Kebudayaan Di Dewan Kesenian Jakarta.” *Adabiyat: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 1 (1): 44–72.